

Rahmawati Sudirman, S.Sos., M.A.P.
Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P.

JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori dan Penerapan Program Kesejahteraan Sosial

Editor:
Christine Purnamasari Andu, S.IP., M.I.Kom.



JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Teori dan Penerapan Program Kesejahteraan Sosial

**Rahmawati Sudirman, S.Sos., M.A.P.
Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P.**

**JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK:
Teori dan Penerapan Program Kesejahteraan Sosial**

Penulis:

**Rahmawati Sudirman, S.Sos., M.A.P.
Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P.**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

Editor:

Christine Purnamasari Andu, S.IP., M.I.Kom.

ISBN:

978-634-317-289-5

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul **"Jaringan Kebijakan Publik: Penerapan Program Kesejahteraan Sosial"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas banyaknya permasalahan kesejahteraan anak yang masih luput dari perhatian serius. Penulis percaya bahwa riset yang tajam dan kebijakan yang tepat adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama — dan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani keduanya demi kepentingan masyarakat yang paling rentan.

Penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya kolaborasi dan jejaring aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik. Secara khusus, buku ini membedah mengenai penerapan Program Kesejahteraan Sosial. Program ini menjadi lokus yang sangat menarik karena mengintegrasikan berbagai layanan perlindungan anak melalui pendekatan kearifan lokal.

Keberhasilan program perlindungan anak tidak dapat bertumpu pada satu instansi saja. Buku ini mengulas bagaimana jaringan kebijakan yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas bekerja sama mengatasi kompleksitas isu anak di lapangan. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi civitas akademika, akademisi, praktisi kebijakan, serta penentu kebijakan dalam merumuskan strategi penerapan program yang efektif dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih yang tulus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Buku ini tentu masih memiliki kekurangan. Penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat luas bagi perkembangan ilmu kebijakan publik dan upaya perlindungan anak di Indonesia.

Makassar, Agustus 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENERAPAN JARINGAN KEBIJAKAN DALAM	
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.....	1
A. Penerapan Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak:	
Studi Kasus PKSAl Sikamaseang Gowa	1
B. Fokus Kajian	8
C. Target Kajian	9
D. Signifikansi Kajian	10
BAB II. PERSPEKTIF DAN KAJIAN KONSEPTUAL.....	11
A. Perspektif Jaringan Antar Organisasi.....	11
1. Teori Jaringan	11
2. Teori Ketergantungan Sumber Daya	12
3. Teori Institusi	12
B. Konsep Jaringan Kebijakan Publik	13
1. Perkembangan Studi Kebijakan Publik.....	13
2. Pengertian Kebijakan Publik	16
3. Jaringan Kebijakan	18
C. Penerapan Kebijakan Dalam Perspektif Jaringan Kebijakan	22
1. Pengertian Penerapan Kebijakan	22
2. Aktor Penerapan Kebijakan.....	23
3. Jaringan Penerapan Kebijakan	25
D. Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan	
Sosial Anak Integratif (PKSAl) Sikamseang	27
E. Telaah Konseptual dan Kajian Terdahulu	
tentang Jaringan Kebijakan	29
F. Konseptualisasi Jaringan Kebijakan dalam	
Penerapan PKSAl Sikamaseang	34
BAB III. PENDEKATAN	37
A. Pendekatan Kajian	37
B. Latar Empiris Kajian	37
C. Konstruksi Data dan Sumber data Kajian	38
D. Mekanisme Perolehan Data Kajian.....	39
E. Penentuan Informan dan Sumber Data Lapangan	40
F. Fokus Kajian Jaringan Kebijakan Publik	41
G. Konstruksi Tinjauan Data Kajian	42

H. Mekanisme Verifikasi Data dan Temuan.....	43
BAB IV. KONFIGURASI WILAYAH KAJIAN	45
A. Gambaran Umum Wilayah Studi	45
B. Dinas Sosial.....	49
C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	54
D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57
E. Dinas Kesehatan	58
F. Dinas Pendidikan	60
G. Yayasan Bakti (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).....	60
H. National Children's Fund (UNICEF).....	62
I. PKSAl.....	63
J. Pencapaian	68
BAB V. TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI).....	87
A. Penerapan Program PKSAl Dalam Perspektif Jaringan Kebijakan Frans van Waarden	87
1. Aktor	87
2. Fungsi Jaringan.....	92
3. Struktur	97
4. Pelembagaan.....	101
5. Aturan Bertindak.....	107
6. Hubungan Kekuasaan	114
7. Strategi Aktor	120
B. Peran Aktor dan Fungsi Jaringan Dalam Penerapan Program PKSAl	126
1. Aktor	126
2. Fungsi Jaringan.....	129
3. Struktur	130
4. Pelembagaan.....	131
5. Aturan Main	133
6. Hubungan Kekuasaan	140
7. Strategi Aktor	142
BAB VI. INTEGRASI TEMUAN DAN ARAH LANJUTAN	145
A. Integrasi Temuan.....	145
B. Arah Lanjutan	146
DAFTAR PUSTAKA	149
PROFIL PENULIS	155
SINOPSIS.....	157

BAB I

PENERAPAN JARINGAN KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

A. PENERAPAN PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: STUDI KASUS PKSAI SIKAMASEANG GOWA

Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu bangsa. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta keluarga. Sinergi antaraktor tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif yang kemudian disingkat PKSAI *sikamaseang* adalah program yang hadir ditengah masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sosial pada anak, dimana diketahui kesejahteraan anak adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ataupun eksploitasi, anak bisa hidup layak sesuai hak dasar kehidupan seperti kasih sayang, kesehatan dan pendidikan. Layanan yang ideal ini hadir dalam wujud pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) *sikamaseang* di Kabupaten Gowa.

Perlindungan dan kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan amanat berbagai regulasi nasional yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, identitas hukum, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN KONSEPTUAL

A. PERSPEKTIF JARINGAN ANTAR ORGANISASI

Alwi dalam Suratman, (2017: 147-151), menguraikan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan tentang jaringan antar organisasi diantaranya teori jaringan, teori ketergantungan sumber daya, dan teori institusi.

1. Teori Jaringan

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang, teori jaringan ini berdasar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip-prinsip dari Wellman dalam Ritzer, 2014: 359, tersebut adalah pertama, ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Kedua, ikatan antara individu harus ditinjau dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Keempat, adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu. Kelima, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata. Keenam, distribusi yang timpang dari sumber daya terbatas menimbulkan baik itu kerja sama maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu dengan bekerja sama, sedangkan kelompok lain akan bersaing dan memperebutkannya. Jadi, teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik. Pemusatan perhatian pada struktur mikro maupun makro adalah salah satu ciri dari teori jaringan, artinya dalam teori jaringan ini aktor bisa saja terdiri dari individu, kelompok, perusahaan serta masyarakat. Hubungan ini dapat terjadi pada lingkup atau skala struktur sosial yang luas maupun pada lingkup yang lebih sempit.

BAB III

PENDEKATAN

A. PENDEKATAN KAJIAN

Kajian dalam buku ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena penerapan kebijakan publik dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis mengkaji berbagai realitas sosial secara alamiah, memahami makna yang dibangun oleh para aktor, serta menjelaskan hubungan antareleman yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Dalam pendekatan ini, telaah dilakukan secara induktif dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi melalui teknik triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Sugiyono, 2013).

Pembahasan dalam buku ini juga mengadopsi perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman, interaksi, serta dinamika yang terjadi dalam penerapan jaringan kebijakan pada program kesejahteraan sosial anak. Pendekatan tersebut memungkinkan penelaahan terhadap berbagai fenomena penerapan kebijakan dalam konteks kehidupan nyata, terutama pada kebijakan yang melibatkan banyak aktor, organisasi, dan kepentingan. Telaah dikembangkan berdasarkan berbagai sumber informasi, seperti hasil pengamatan, wawancara, dokumen, regulasi, serta berbagai laporan yang relevan sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan jaringan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak (Yin, 2014; Creswell, 2014).

B. LATAR EMPIRIS KAJIAN

Kajian dalam buku ini didasarkan pada hasil studi lapangan yang dilaksanakan pada periode Juni hingga September 2022. Studi tersebut mengambil lokasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku

BAB IV

KONFIGURASI WILAYAH KAJIAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan berbagai program pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Masyarakat Kabupaten Gowa didominasi oleh suku Makassar dengan penggunaan bahasa Makassar sebagai salah satu bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, yang turut mewarnai nilai-nilai sosial, budaya, serta kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam visi pembangunan daerah, yaitu: **"Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan beberapa misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan hak-hak dasar, penguatan kesetaraan gender, serta pengembangan nilai-nilai budaya dan keagamaan.
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antarwilayah dan antarsektor pembangunan.
4. Memperkuat pembangunan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan daerah.

BAB V

TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)

A. PENERAPAN PROGRAM PKSAI DALAM PERSPEKTIF JARINGAN KEBIJAKAN FRANS VAN WAARDEN

1. Aktor

Sub dimensi pertama dalam kategori pelaku tentu saja jumlah peserta. Ini menentukan ukuran jaringan, untuk mengtelaah proses pelaksanaan kebijakan program PKSAI yang berbasis jaringan di Kabupaten Gowa menggunakan konsep jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden, dimana konsep yang pertama yaitu terkait aktor, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*), adapun uraian penjelasan terkait aktor, berikut kita simak penjelasan dari RS selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial (PRS) Dinas Sosial Kabupaten Gowa, di bawah ini yang menjelaskan bahwa:

“...Yang terlibat ada beberapa SKPD, karena sudah jelas bahwa dalam masalah penanganan anak bukan hanya di Dinas Sosial saja akan tetapi beberapa stakeholders yang terkait juga terlibat di dalamnya misalnya dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pencatatan sipil, juga kemudian dari kepolisian terlibat ketika ada yang melakukan pelaporan...” (Wawancara, 20 Juni 2022).

Demi tercapainya kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh maka terdapat beberapa stakeholders dalam proses pelaksanaan PKSAI sebagai penunjang, diketahui selain dinas sosial sebagai pusat lahirnya program ini terdapat pula keterlibatan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pencatatan sipil dan dinas lainnya yang akan mengambil peran terhadap masing-masing persoalan anak. Berikut

BAB VI

INTEGRASI TEMUAN DAN ARAH LANJUTAN

A. INTEGRASI TEMUAN

Berdasarkan hasil kajian terkait jaringan kebijakan dalam penerapan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) sikamaseang di Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa jaringan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan yang ada sesuai dengan pandangan dari Waarden (1992).

1. Aspek aktor, dalam jaringan kebijakan program PKSAI sikamaseang di Kabupaten Gowa, dilihat dari adanya keterlibatan aktor yang memadai dengan memainkan peran masing-masing. Aktor pelaksana terdiri dari 9 SKPD, didukung organisasi antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Aspek fungsi jaringan dalam penerapan program PKSAI sikamaseang di Kabupaten Gowa diwujudkan dengan menempatkan fungsi jaringan sebagai alat komunikasi dan koordinasi yang terhubung dalam setiap tindakan pelaksana terkhusus pada saat proses pertukaran sumber daya.
3. Struktur jaringan kebijakan publik dalam penerapan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif sikamaseang di Kabupaten Gowa, terlihat dari adanya putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Gowa. Serta Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 16/ BPRS.2/ DSTKT/ II/ 2017 Tentang Susunan Tenaga Kesekretariatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang Kabupaten Gowa.
4. Pelembagaan dalam jaringan penerapan program PKSAI di Kabupaten Gowa, digambarkan dari adanya dukungan formal dalam lembaga pelaksana yang hanya ada pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, S, Z. 2006. Kebijakan Publik (Edisi Ketiga). Jakarta: Suara Bebas.
- Agustiono, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J.E. 1978. Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and Wiston.
- Anderson, J.E. 2006. Public Policy Making: An Introduction. Belmont: Wadsworth.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Benson, J. K. 1982. A Framework for Policy Analysis, In D.L. Rogers and D. Whetten (eds.), Interorganizational Coordination: Theory, Research and Implementation, Ames: Iowa State University Press.
- Borzal, Tanja A. 1998. Organizing Babylon on the Different Conceptions of Policy Networks, Public Administration, 76:233-273.
- Creswell, W, John. 2014. Kajian Kualitatif Dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. (Edisi Terjemahan). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Duun, William. 1999. Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Easton, David. 1953. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf.
- Easton, D. 1971. A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Mirilee S. 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World. New Jersey: Princetown University: Waltham.
- Hay, Colin, and David Richards. 2000. The Tangled Webs Of Westminster and Whitehall: The Discourse, Strategy And Practice Of Networking Within The British Core Executive, Public Administration, 78(1): 1-28.
- Islamy, Irfan. 2014. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Friedrick, Carl. 1979. Man and His Government. New York: Mc Graw Hill.
- Jenkins, W.I. 1978. Policy Analysis. Oxford. Martin Robertson.

- Jones, Gareth R. 2004. *Organizational Theory, Design, and Change: Text and Cases*. Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey: USA.
- Kartiwa, Asep. 2015. *Metode Kajian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kasmad, Rulinawaty. 2014. *Telaah Jaringan Perkembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin: Diseratsi.
- Khaizu. 2009. *Pelayanan Kesejahteraan Anak*. Bandung: Gadjah Mada University.
- Klijn, Erik-Hans, and Joop F. M. Koppenjan. 2000. *Public Management and Policy Networks*, *Public Management* 2 (2): 135-158.
- Klijin, E.H and Joop Koppejan. 2016. *Governance Networks in The Public Sector*. Routledge. New York.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lasswell, Harold & Kaplan, Abraham. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Lester and Stewart. 2000. *Public Policy in Revolutionary Approach*, (Second Edition). USA: Wadsworth Thomson Learning.
- Linbdlom, C. 1999. *Public Policy Perspectives and Choices*. The McGraw- Hill Companies, Inc, United State of America.
- Mark, Coinsidine. 1995. *Public Policy: A Critical Approach*. Prentice Hall.
- Marsh, David and R. A. W. Rhodes. 1992. *Policy Communities and Issue Networks: Beyond Typology*, In David Marsh and R. A. W. Rhodes. (Eds), *Policy Networks in British Government*, Oxford: Clarendon Press.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Mediansyah, Achmad Risa. 2015. *Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Penerapan Kebijakan Transportasi Di Kota Makassar*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Telaah Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Telaah, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

- O'Toole, L. J. Jr. 2012. Interorganizational Relation in Implementation. In Peters, B, G and Pierre, J. Handbook of Public Administration. (Second Edition). London: Sage Publication.
- Parsons, Wayne. 2011. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Telaah Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, Erwan. Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Penerapan Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rhodes, R. A. W. 1985. Power Dependence, Policy Communities and Intergovernmental Networks, Public Administration Bulletin 49:45-31.
- Rhodes, R. A. W. 1986. The National World of Local Government, London: Allen and Unwin.
- Rhodes, R. A. W. and David Marsh. 1992. Policy Networks in British Politics: A Critique Of Existing Approaches, In David Marsh and R. A. W. Rhodes (eds), Policy Networks In British Government. Oxford: Clarendon Press.
- Ripley, Randall B. 1985. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Modern, Edisi Ketujuh (Terjemahan). Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Rulinawaty. 2020. Resources Saring: Aktor Publik, Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan. Depok: Lembaga Kajian Dan Pengembangan Ilmu.
- Scott, Richard. (2008). Institutions and Organization Ideas and Interest. USA: Sage Publication.
- Smith, Martin. 1993. Pressure, Power and Policy, London: Harvester Wheatsheaf.
- Subarsono. 2008. Telaah Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. Metode Kajian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Kajian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suratman. 2017. Generasi Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Publik. Makassar: Cipiya Publishing.
- Susanti, Gita. 2012. Jaringan Pelayanan Publik yang Demokratis Studi Kasus Penentuan Strategi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar. Disertasi. Universitas Hasanuddin.

- Tachjan. 2006. Penerapan Kebijakan Publik. Truen RTH: Bandung. Taufik, 2015. Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Penerapan Kebijakan Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Thoha, Miftha. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Udoji., Chief J.O. 1981. The African Public Servant as Public Policy in Africa. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yin, R.K. 2014. Studi Kasus, Desain dan Metode (Edisi Terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

- Alwi, 2012. Network Implementation Analysis on Democratic Public Service. Internasional Jurnal Of Administration Science and Organization, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi; Vol. 15, No. 2. May 2012. Akreditasi Dikti Kemendiknas Ri No. 64a/DIKTI/Kep/2010.
- Carlsson, Lars dan Sandström. 2008. Network Governance Of The Commons, International Jurnal Of The Commons Vol 2, No 1 January 2008, pp. 33-54, Utrecht Publishing and Archiving Services For IASC, Igitur.
- Doherty, Brian, Matthew Paterson, Alexandra Plows and Derek Wall. 2003. Explaining the Fuel Protests, British Journal of Politics and Internasional Relations 5 (1): 1-23.
- Kasmad, Rulinawaty. Alw. La Tamba. 2018. Direction Dilemma of Street-Level Bureaucracy In Implementation Of The Street Vendors Empowerment Policy In Makassar City. Indonesia. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) Vol. 2. Issu. 8. ISSN-2378-703X.
- Maloney, William A. Grant Jordan and Andrew M. McLaughlin. 1994. Interest Groups and Public Policy: The Insider/ Outsider Model Revisited, Journal of Public Policy 14 (1): 17-38.
- Rhodes, R. A. W. 1990. Policy Network, Journal of Theoretical Politics, 2(3), pp. 293-317. doi: 10.1177/0951692890002003003.
- Sanjaya, Muhammad, Jodi. 2022. Jaringan Kebijakan Dalam Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan

- Rendah (MBR) Di Kabupaten Bandung. Vol 13, Number 2 Hal. 210-216, JANE (Jurnal Administrasi Negara).
- Smith, Martin. 2000. Prime Ministers, Ministers and Civil Servants in the core executive, in R.A.W. Rhodes (ed.) Transforming British Government Volume 1: Changing Institutions. London: Macmillan.
- Thacher, M.1998. The Development of Policy Network Analyses: From Modest Origins to Overarching Frameworks, Journal of Theoretical Politics, 10(4), pp. 389-416. doi: 10.1177/0951692898010004002.
- Waarden, Frans Van. 1992. Dimensions and Types of Policy Networks, European Journal Of Political Research 21(1): 29-52.
- Zhou, Nan. Et Al. 2014. Citizen Participation In The Public Policy Process In China: Based On Policy Network Theory. Journal Public Administration Research; Vol. 3, No. 2; 2014. www.ccsenet.org/par.

DOKUMEN RESMI PEMERINTAH:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014, amandemen UU Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Program PKSAI.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 16/BPRS.2/DSTKT/II/2017 Tentang Susunan Tenaga Kesekretariatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang Kabupaten Gowa.
- Keputusan Bupati Gowa Nomor 240/ III/ 2017 Tecatat Tanggal 17 Maret 2017. Susunan Keanggotan Dalam Rangka Optimalisasi Program PKSAI.

PROFIL PENULIS



Rahmawati Sudirman, S.Sos., M.A.P. Lahir di Enrekang, 28 Agustus 1997, penulis adalah akademisi muda berusia 28 tahun yang menaruh perhatian besar pada isu kebijakan publik, politik, dan organisasi pemerintahan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar (2019), kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin

Makassar pada tahun 2022 — menjaga kelinearan keilmuan yang konsisten di bidang administrasi dan kebijakan publik. Semasa studi, penulis aktif berkontribusi dalam organisasi akademik sebagai Sekretaris Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik (KIAP), serta pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pendataan Organisasi Anggota (POA). Peran-peran tersebut menempa kemampuan manajerial dan kepekaan sosialnya dalam memahami dinamika organisasi dan kebijakan secara langsung. Kini penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi (UTS), mengampu mata kuliah Ilmu Politik, Manajemen dan Organisasi, serta Perbandingan Politik. Di samping kegiatan mengajar, penulis aktif terlibat dalam kajian yang didanai pemerintah melalui skema Bantuan Insentif Masyarakat Akademik (BIMA) Kemdiktisaintek — sebagai wujud nyata komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat.



Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P. Lahir pada 11 Oktober 1997. Menamatkan pendidikan sarjana pada Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan memperoleh gelar tersebut pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, dan lulus pada tahun 2022. Saat ini, penulis berkarier sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi.

Dalam kiprah akademiknya, penulis menaruh perhatian pada kajian administrasi publik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta inovasi pelayanan publik. Pengalaman riset penulis juga tandai dengan keberhasilan memperoleh pendanaan kajian BIMA sebagai ketua, serta publikasi sejumlah karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 dan SINTA 5, dan satu artikel pada jurnal internasional bereputasi WOS. Melalui kegiatan pengajaran dan kajian, penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pemerintahan daerah.

SINOPSIS

Kesejahteraan anak bukan sekadar cita-cita, hal ini adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi nyata dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor seringkali menjadi titik lemah yang membuat program-program sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Buku ini hadir untuk membedah secara mendalam bagaimana jaringan kebijakan publik bekerja dalam Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa — sebuah program layanan terpadu yang melibatkan kolaborasi lintas sektor demi terpenuhinya hak dasar anak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Melalui kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan — mulai dari sembilan SKPD, Yayasan Bakti, hingga UNICEF — buku ini memotret secara nyata bagaimana tujuh dimensi jaringan kebijakan bekerja di lapangan: aktor, fungsi jaringan, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.

Hasilnya mengungkap sebuah gambaran yang jujur: enam dari tujuh dimensi telah berjalan dengan baik, namun satu dimensi krusial masih menjadi pekerjaan rumah bersama — konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam alur manajemen kasus yang belum seragam di lapangan. Sebuah temuan yang relevan tidak hanya untuk Kabupaten Gowa, tetapi bagi siapa saja yang terlibat serta ingin lebih memahami mengenai penerapan kebijakan sosial di Indonesia dan dinamika jaringan dalam penerapan program kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak bukan sekadar cita-cita ia adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi nyata dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor seringkali menjadi titik lemah yang membuat program-program sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Buku ini hadir untuk membedah secara mendalam bagaimana jaringan kebijakan publik bekerja dalam implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa, sebuah program layanan terpadu yang melibatkan kolaborasi lintas sektor demi terpenuhinya hak dasar anak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Melalui kajian kualitatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari sembilan SKPD, Yayasan Bakti, hingga UNICEF buku ini memotret secara nyata bagaimana tujuh dimensi jaringan kebijakan bekerja di lapangan: aktor, fungsi jaringan, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.

Hasilnya mengungkap sebuah gambaran yang jujur: enam dari tujuh dimensi telah berjalan dengan baik, namun satu dimensi krusial masih menjadi pekerjaan rumah bersama, konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam alur manajemen kasus yang belum seragam di lapangan. Sebuah temuan yang relevan tidak hanya untuk Kabupaten Gowa, tetapi bagi siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan sosial di Indonesia. Buku ini relevan bagi akademisi, mahasiswa administrasi publik dan ilmu politik, praktisi sosial, serta para pengambil kebijakan yang ingin memahami secara mendalam dinamika jaringan dalam implementasi program kesejahteraan anak.



Rahmawati Sudirman, S.Sos., M.A.P. Lahir di Enrekang, 28 Agustus 1997, penulis adalah akademisi muda berusia 28 tahun yang menaruh perhatian besar pada isu kebijakan publik, politik, dan organisasi pemerintahan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar (2019),

kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022 menaja kelinearan keilmuan yang konsisten di bidang administrasi dan kebijakan publik. Semasa studi, penulis aktif berkontribusi dalam organisasi akademik sebagai Sekretaris Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik (KIAP), serta pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pendataan Organisasi Anggota (POA). Peran-peran tersebut menempa kemampuan manajerial dan kepekaan sosialnya dalam memahami dinamika organisasi dan kebijakan secara langsung. Kini penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi (UTS), mengampu mata kuliah Ilmu Politik, Manajemen dan Organisasi, serta Perbandingan Politik. Di samping kegiatan mengajar, penulis aktif terlibat dalam penelitian yang didanai pemerintah melalui skema Bantuan Insentif Masyarakat Akademik (BIMA) Kemdiktisaintek sebagai wujud nyata komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berpijak pada kebutuhan masyarakat.



Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P. Lahir pada 11 Oktober 1997. Menamatkan pendidikan sarjana pada Program Studi Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan memperoleh gelar tersebut pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, dan lulus pada tahun 2022. Saat ini,

penulis berkarier sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi. Dalam kiprah akademiknya, penulis menaruh perhatian pada kajian administrasi publik, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta inovasi pelayanan publik. Pengalaman riset penulis juga tandai dengan keberhasilan memperoleh pendanaan penelitian BIMA sebagai ketua, serta publikasi sejumlah karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 dan SINTA 5, dan satu artikel pada jurnal internasional bereputasi WOS. Melalui kegiatan pengajaran dan penelitian, penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pemerintahan daerah.

 www.penerbitwidina.com

 @penerbitwidina

 penerbit widina

 penerbitwidina@gmail.com

 widina store

 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
☎ 0815-7000-699



SCANME

Sosial & Humaniora

ISBN 978-634-317-289-5



9

786343

172895